

PERAN KETERWAKILAN ANGGOTA DPRD PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BALIKPAPAN

Megawati Putri Maharani

NPP. 32.0784

Asdaf Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: megawatiputrimaharani@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): *There has been an increase in the acquisition of seats for the Golkar Party from 11 seats in 2019 to 16 seats in 2024. Although it managed to become the party with the most seats in Balikpapan City, the results still did not meet the party's internal target of 18 seats. **Purpose:** This study aims to examine the role of representation of members of the Golongan Karya Party DPRD in the 2024 General Election in Balikpapan City, as well as the factors that become opportunities and obstacles to the election of these party members in achieving the legislative seat target. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The analysis of this study uses the theory of representation from Hanna F. Pitkin with four main dimensions: representative, represented, representative substance, and political context. This theory is complemented by the role theory of Biddle & Thomas to analyze social expectations, norms, performance, and evaluations of legislators. **Results:** The results of the study show that the representation dimension in the "representative" and "represented" aspects has been carried out quite effectively through recess activities and constituent dialogue. However, in the dimension of "representative substance", involvement of indigenous groups and youth is still limited. Meanwhile, in the "political context", the open proportional election system and internal party dynamics are obstacles to achieving targets. **Conclusion:** Effective representation requires not only a formal presence in parliament, but also adaptation to the ever-evolving local socio-political dynamics.*

Keywords: *Representation, Golkar Party, DPRD Members, 2024 Election, Balikpapan, Role Theory*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Terjadi peningkatan perolehan kursi Partai Golkar dari 11 kursi pada tahun 2019 menjadi 16 kursi pada tahun 2024. Meskipun berhasil menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di Kota Balikpapan, hasil tersebut masih belum memenuhi target internal partai yaitu 18 kursi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran keterwakilan anggota DPRD Partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Balikpapan, serta faktor yang menjadi peluang dan hambatan keterpilihan anggota partai tersebut dalam mencapai target kursi legislatif. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi

dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan teori keterwakilan dari Hanna F. Pitkin dengan empat dimensi utama: wakil, yang diwakili, substansi perwakilan, dan konteks politik. Teori ini dilengkapi dengan teori peran dari Biddle & Thomas untuk menganalisis ekspektasi, norma, performa, dan evaluasi sosial terhadap anggota legislatif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi keterwakilan pada aspek “wakil” dan “yang diwakili” telah dijalankan cukup efektif melalui kegiatan reses dan dialog konstituen. Namun pada dimensi “substansi perwakilan”, keterlibatan terhadap kelompok adat dan pemuda masih terbatas. Sementara dalam “konteks politik”, sistem pemilu proporsional terbuka dan dinamika internal partai menjadi hambatan dalam pencapaian target. **Kesimpulan:** Keterwakilan yang efektif tidak hanya membutuhkan kehadiran formal dalam parlemen, tetapi juga adaptasi terhadap dinamika sosial-politik lokal yang terus berkembang.

Kata Kunci: Keterwakilan, Anggota DPRD, Partai Golkar, Pemilu 2024, Kota Balikpapan, Teori Peran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah cara untuk menjalankan kedaulatan rakyat dimana rakyat berperan penting dalam menjalankan pemilihan dengan keputusan yang tepat (Larsson, 2023; Meijers & Zaslove, 2021). Penggunaan hak suara sangat penting untuk mengembangkan gagasan kekuasaan yang berada di tangan rakyat, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lambelanova et al., 2022; Tarigan & Ginting, 2020). Oleh karena itu, partisipasi rakyat ataupun suara rakyat di berbagai daerah sangatlah penting (Janusz et al., 2022; Slothuus & Bisgaard, 2021).

Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secara serentak berdasarkan Undang-Undang 2 Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu 2024 digelar untuk memilih Anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden. Selain itu, Pemilu 2024 juga menjadi ajang pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilihan legislatif dan presiden, serta 27 November 2024 untuk pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, pemilu serentak nasional dan daerah akan berlangsung pada tahun 2024 (Lambelanova et al., 2024).

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota paling strategis dan penting di Kalimantan Timur. Dengan jumlah penduduk 738.532 yang merupakan tertinggi ke-3 di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2003. Dikenal sebagai pusat industri dan ekonomi, dengan adanya Pelabuhan Semayang dan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman berfungsi sebagai gerbang utama pergerakan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga mendukung dominasi sektor energi dan sumber daya alam. Terlebih dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) yang bertempat di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga menjadikan Kota Balikpapan sebagai gerbang utama pergerakan menuju (IKN) Ibu Kota Negara.

Secara khusus, pada setiap pelaksanaan pemilihan terdapat beberapa partai yang mendominasi dan pada pemilihan DPRD Di kota Balikpapan. Dari beberapa kali Pemilu, Partai Golongan Karya tampil dengan cukup mendominasi Pada pemilihan tahun 2024 yang diikuti oleh 509.487 pemilih di Kota Balikpapan Partai Golongan Karya tampil sebagai pemenang dengan perolehan 16 kursi dari total 45 kursi di DPRD kota Balikpapan dengan perolehan kursi mencapai 36%, data tersebut dapat dilihat pada infografis berikut.

Tabel 1.

Perolehan Kursi Anggota DPRD Tahun 2024 di Kota Balikpapan

Nama Partai	Jumlah Kursi	Total Suara
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	16	122.584
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	7	42.259
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	6	36.706
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4	43.778
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	26.293
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	26.539
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	20.928
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2	9.797
Partai Demokrat	1	18.094
TOTAL	45	326.050

Sumber: diolah oleh penulis, 2024

Pada pemilu tahun 2024 Partai Golkar cukup bisa menunjukkan eksistensinya di Kota Balikpapan. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa perolehan suara yang dihasilkan Partai Golkar memiliki selisih yang sangat signifikan dibandingkan perolehan suara partai yang lainnya dengan jumlah perolehan suara 122.584 suara.

Tabel 2.

Perbandingan Perolehan Kursi Anggota DPRD di setiap Partai Tahun 2014 hingga 2024

Nama Partai	Jumlah Kursi 2014	Jumlah Kursi 2019	Jumlah Kursi 2024
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	12	11	16
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3	3	7
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	6	6	6
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6	8	4
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	1	4

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	6	3
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	3	2
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	6	2	2
Partai Demokrat	4	4	1
Partai Perindo	-	1	-
Partai Bulan Bintang	1	-	-
TOTAL	45	45	45

Sumber: dioleh oleh penulis, 2024

Dari tabel di atas didapati bahwa dalam pemilihan DPRD kota Balikpapan tahun 2024 Partai Golkar mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu 5 kursi atau 45,4% dari pemilihan tahun 2019 dibandingkan partai lain. Bahkan terdapat Partai yang mengalami penurunan perolehan kursi seperti Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Perindo.

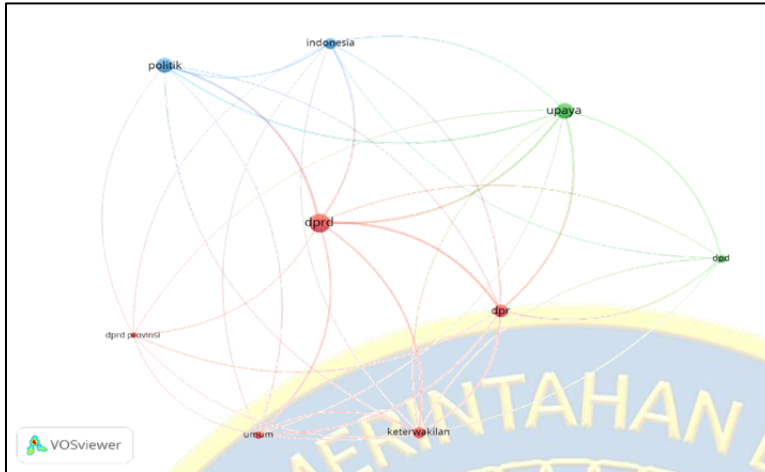
1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Peningkatan perolehan kursi anggota DPRD Parta Golongan Karya pada pemilu tahun 2024 tentu berkaitan dengan peran keterwakilan anggota DPRD Partai Golongan Karya pada periode sebelumnya (Bhera et al., 2025; Peris & Setianingrum, 2025). Secara eksternal Partai Golongan memperoleh peningkatan jumlah kursi DPRD Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2019 dan dengan partai nasional lainnya, namun jika dikaitkan dengan target internal Partai Golongan Karya dalam Pemilu 2024 sebanyak 18 Kursi, realisasi perolehan kursi hanya sebanyak 16 kursi (wawancara dengan Bendahara Umum DPD Partai Golongan Karya Kota Balikpapan Drs. H. Ahmad Mallolongan Tanggal 3 Desember 2024). Dengan mengacu pada uraian di atas, maka identifikasi masalah yang dirumuskan adalah: adanya kontradiksi perolehan kursi Partai Golongan Karya, yakni disatu sisi perolehan kursi DPRD dari Partai Golongan Karya meningkat di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2019 ,namun disisi lain Keterpilihan Anggota DPRD Partai Golongan Karya pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan oleh internal Partai Golongan Karya. Fenomena-fenomena tersebut menjadi fokus perhatian dan sangat menarik untuk diteliti oleh penulis.

1.3 Penelitian Terdahulu

Guna memperoleh ruang kosong yang belum diteliti dalam penelitian sebelumnya, maka penulis akan memetakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penulis menggunakan VOS viewer untuk melihat keterkaitan antara topik-topik pada penelitian sebelumnya. VOS Viewer merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Van Eck dan Waltman pada tahun 2010 di Pusat Studi Sains dan Teknologi Universitas Leiden. VOS Viewer dapat membuat peta jaringan publikasi dan jurnal ilmiah, peneliti dan organisasi penelitian, serta berbagai kata kunci lainnya yang diklasifikasikan dalam peta jaringan yang saling terkait (Abraham, 2022). Penulis menggunakan kata kunci “Keterwakilan Anggota DPRD” dalam penelusuran menggunakan database Google Scholar yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2024.

Gambar 1.
Vosviewer Penelitian



Sumber: diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan bahwa “Keterwakilan Anggota DPRD” berhubungan erat antara politik, upaya, dan keterwakilan. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan Peran Keterwakilan Anggota DPRD Partai Golongan Karya pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Penelitian yang berjudul “Penurunan Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Aceh Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh” oleh Saifullah (2024) menemukan bahwa dengan diterapkannya sistem penentuan kursi yang mulai berlaku pada 2019 lalu yaitu *sainte lague*, oleh internal partai Aceh menilai berpengaruh terhadap penurunan kursi partai pada parlemen DPRK Pidie. Tetapi partai Aceh tetap menjadi pemenang dalam Pilkada, karena dapat memilih kader- kader dengan latar belakang yang baik. Penelitian yang berjudul “Peningkatan Perolehan Kursi Partai Nasdem Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Maros” oleh Nur et al. (2022) menemukan bahwa alasan meningkatnya perolehan kursi partai Nasdem pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Maros antara lain karena mendapat kepercayaan karena partai ini mempunyai Pelembagaan yang sudah sangat bagus dapat dilihat dari pengakaran partai yang kuat dalam masyarakat kemudian kompetisi yang kuat dalam internal partai, dan strategi politik Partai NasDem yang dijalankan pada pemilu 2019 di Kabupaten Maros. Penelitian yang berjudul “Strategi Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan DPRD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Studi Kasus Partai PDI Perjuangan)” oleh Muslimin (2024) menemukan bahwa peningkatan keterwakilan Perempuan DPRD Kota Tidore pada Partai PDI Perjuangan adalah karena mampu menghasilkan kader yang berkualitas dan dapat memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi dan meraih kemajuan partai yang maksimal. Penelitian yang berjudul “Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)” oleh Niron & Seda (2020) menemukan bahwa keterwakilan politik perempuan di Indonesia dalam kontestasi elektoral masih bersifat deskriptif yakni hanya untuk memenuhi persyaratan administratif kuota 30 persen dalam Pemilu 2019. Penelitian yang berjudul “Strategi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa Dalam Meningkatkan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Sumbawa 2024” oleh Lestari & Taubih (2024) menemukan bahwa DPC partai demokrat kabupaten Sumbawa telah mengimplementasi berbagai strategi marketing politik berdasarkan Segmentasi politik, strategi targeting politik dan strategi positioning

politik. Agastya et al. (2024) dengan penelitian yang berjudul “Pemetaan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik di Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019” menemukan bahwa peta sebaran perolehan suara caleg di 6 daerah pemilihan, Abdulloh yang berasal dari Partai Golongan Karya memperoleh suara terbanyak dengan 6.285 suara, kemudian pada perolehan suara parpol, Partai PDIP menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak yakni 30 kecamatan dari 34 kecamatan secara keseluruhan. Wibisono et al. (2023) dengan penelitian berjudul “Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Mempertahankan Suara Partai Sebagai Partai Tengah” menemukan bahwa strategi komunikasi politik partai Golkar dalam mempertahankan suara sebagai partai tengah pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi adalah dengan menerapkan strategi ofensif, yang terdiri dari strategi kampanye terbuka dan strategi penggunaan media. Strategi defensif yang terdiri dari kunjungan door to door, dialog tertutup, strategi pesan dan strategi mempertahankan pasar. Penelitian terdahulu menjadi landasan teoretis yang mendukung kerangka pemikiran penelitian sekaligus mengungkap kesenjangan studi yang masih jarang dibahas terkait keterwakilan anggota DPRD Partai Golongan Karya pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Balikpapan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis mengidentifikasi kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang membuka peluang untuk menghadirkan unsur kebaruan dalam penelitian ini. Terdapat perbedaan dengan penelitian Saifullah (2024), antara lain perbedaan lokus yaitu pada kabupaten Pidie dan Kota Balikpapan. Fokus pada menurunnya anggota DPRK Partai Aceh, sedangkan penelitian ini fokus pada meningkatnya jumlah anggota DPRD Partai Golongan Karya yang belum mencapai target internal. Perbedaan dengan penelitian Nur et al. (2022), antara lain perbedaan lokus yaitu pada DPRD Kabupaten Maros sedangkan penelitian terkini pada DPRD Kota Balikpapan. Juga perbedaan partai yang diteliti yaitu partai Nasdem dan pada penelitian ini Partai Golongan Karya. Perbedaan dengan penelitian Muslimin (2024), meliputi teori penelitian yang digunakan adalah analisis SWOT sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori keterwakilan. Perbedaan dengan penelitian Niron & Seda (2020), meliputi fokus penelitian terbatas pada bagaimana representasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap peningkatan kursi DPRD Kota Balikpapan yang berasal dari partai Golongan Karya. Perbedaan dengan penelitian Lestari & Taubih (2024), yaitu befokus pada strategi yang digunakan guna meningkatkan jumlah pemilih pada pemilu legislatif Kabupaten Sumbawa 2024 sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap alasan meningkatnya kursi DPRD Kota Balikpapan yang berasal dari partai Golongan Karya. Perbedaan dengan penelitian Agastya et al. (2024), yaitu befokus pada pemetaan suara dan kursi partai politik, sedangkan penelitian ini befokus pada keterwakilan anggota DPRD Partai Golongan Karya. Perbedaan dengan penelitian Wibisono et al. (2023), yaitu lebih berfokus pada pembahasan strategi komunikasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada keterwakilan anggota DPRD Partai Golongan Karya.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran keterwakilan Anggota DPRD Partai Golongan Karya, memperoleh gambaran dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi peluang dan penghambat keterpilihan anggota DPRD dari Partai Golongan Karya dalam mencapai target perolehan kursi yang ditetapkan pada Pemilihan Umum 2024 Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memahami fenomena keterpilihan anggota DPRD Partai Golongan Karya pada Pemilu tahun 2024. Creswell & Creswell (2018) mengemukakan penelitian kualitatif menguraikan pandangan informan dan memahami masalah atau manusia berdasarkan konstruksi gambaran verbal secara holistik yang ditempatkan dalam *setting* ilmiah. Penulis menggunakan Teori Keterwakilan Pitkin (1967) yang terdiri atas 4 (empat) dimensi, yaitu wakil, yang diwakili, substansi perwakilan, dan konteks politik. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, termasuk individu yang memiliki pengetahuan terkait topik penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan atas keterpilihan anggota DPRD tahun 2024, daftar hadir anggota DPRD, profil para anggota DPRD Kota Balikpapan Partai Golongan Karya, dan lain sebagainya. Informan penelitian dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kota Balikpapan partai Golongan Karya, Bendahara Umum DPD Partai Golongan Karya Kota Balikpapan, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Bergama Kota Balikpapan, Bendahara Komite Nasional Pemuda Indonesia, Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan, dan 3 (orang) perwakilan masyarakat. Instrumen penelitian terdiri atas panduan wawancara, panduan observasi, dan panduan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2025 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan dan Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kota Balikpapan yang disesuaikan dengan Kalender Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2024/2025.

III. HASIL/PEMBAHASAN

3.1 Peran Keterwakilan Anggota DPRD Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2024 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 16 kursi dari total 45 kursi yang tersedia di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Meskipun hasil ini menunjukkan bahwa Golkar tetap menjadi salah satu kekuatan politik dominan di tingkat daerah, jumlah kursi yang diperoleh tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan partai, yaitu sebanyak 18 kursi. Target ini kemungkinan besar ditetapkan sebagai bagian dari strategi partai untuk memperkuat pengaruhnya di legislatif serta memastikan posisi yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan politik di tingkat kota. Ketidakmampuan untuk mencapai target ini dapat diartikan sebagai adanya hambatan atau penurunan daya dukung dari masyarakat terhadap partai yang bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti menurunnya kepercayaan publik, perubahan tren pemilih, munculnya partai-partai baru yang lebih menarik bagi generasi muda, atau kurang optimalnya mesin partai dalam melakukan konsolidasi suara di akar rumput.

Walau begitu, dengan 16 kursi yang dimiliki Partai Golkar tetap memiliki posisi strategis dan cukup kuat di DPRD Kota Balikpapan. Dengan proporsi sekitar 35,5% dari total kursi partai ini masih bisa memainkan peran penting dalam membentuk koalisi politik, mengusulkan kebijakan, serta menempatkan kadernya di posisi-posisi strategis legislatif, termasuk dalam pemilihan unsur pimpinan DPRD. Namun, agar ke depan dapat

mempertahankan bahkan meningkatkan kekuatan politiknya Golkar perlu memperbaiki kinerja internal, meningkatkan peran anggota dewan dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan melakukan pendekatan yang lebih humanis serta terbuka kepada masyarakat. Pencapaian yang sudah didapat walaupun belum memenuhi target tetap menjadi modal penting untuk membangun strategi politik yang lebih solid dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat Kota Balikpapan. Evaluasi menyeluruh serta langkah-langkah perbaikan sejak dini sangat dibutuhkan agar pada pemilu berikutnya Golkar dapat merebut kembali suara yang hilang dan meraih target yang telah ditetapkan. Kemudian, Keterwakilan anggota Golongan Karya dalam DPRD Kota Balikpapan ditinjau dari beberapa dimensi dan indikator teori keterwakilan seperti dibawah ini.

3.1.1 Representasi Wakil

Menurut Pitkin wakil adalah orang yang dipilih oleh Masyarakat dalam sebuah pemilihan umum. Seperti diketahui dalam parlemen dewan perwakilan rakyat daerah Kota Balikpapan di dominasi oleh perwakilan yang berasal dari fraksi partai Golongan Karya. Pada pergelaran pemilu periode 2024-2029 tingkat keterwakilan partai Golongan Karya pada parlemen DPRD Kota Balikpapan mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan menjadi partai pemenang pemilu.

a. Kualitas Wakil

Kualitas seorang anggota dewan salah satunya dapat dinilai dari Usia. Usia sering kali berkaitan dengan akumulasi pengalaman hidup. Melalui pegalaman yang diperoleh dari rentang waktu yang panjang, seseorang dapat mengembangkan kebijaksanaan, pemahaman, dan keterampilan yang mempengaruhi kualitas hidup. Seiring bertambahnya usia, biasanya seseorang dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperdalam pengetahuan danketerampilan dalam berbagai bidang, yang dapat mempengaruhi kualitas seseorang dalam pekerjaan, hubungan, dan kehidupan secara umum. Pertumbuhan emosional dan psikologis seseorang bertumbuh seiring bertambahnya usia, pertumbuhan emesional dan psikologis tetunya dapat mempengaruhi kualitas hubungan interpersonal, kestabilan emsional, dan kematangan pribadi. Berikut daftar anggota dewan fraksi partai Golongan Karya berdasarkan Usia.

Tabel 3.
Anggota DPRD Kota Balikpapan Partai Golongan Karya Periode 2024-2029 Berdasarkan Usia

No	Nama	Tanggal Lahir	Usia (Tahun)
1.	Aguslimin	Balikpapan, 26 Agustus 1973	52
2.	Alwi Al Qadri	Balikpapan, 01 Maret 1977	48
3.	Andi Arif Agung	Balikpapan 29 Juni 1978	47
4.	Doris Eko Rian Desyanto	Lamongan, 15 Desember 1991	34
5.	Fadilah	Balikpapan. 28 Agustus 1990	35
6.	Fauzi Adi Firmansyah	Brebes, 12 Juni 1986	39
7.	Gasali	Masamba, 17 September 1978	47
8.	H. Riyan Indra Saputra	Balikpapan, 20 Agustus 1989	36
9.	H. Yusri, S.E	Balikpapan, 27 Juli 1977	48
10.	Hj. Kasmah, S.Sos	Maradda, 12 Agustus 1962	63
11.	Hj. Muliati, S.Pd	Tanete, 3 Maret 1973	52
12.	Hj. Suwarni, S.H	Pare Pare, 2 September 1965	60

13.	Nelly Turuallo, S.E	Makale, 23 Oktober 1961	64
14.	Subari	Balikpapan, 20 Desember 1966	59
15.	Suriani	Balikpapan, 5 Juli 1976	49
16.	Wahyullah Bandung	Teteaji, 8 November 1977	48

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, 2025

Anggota dewan dari partai Golongan Karya jika dilihat dari umurnya rata-rata berada pada usia diatas 40 tahun dimana usia diatas 40 tahun adalah usia paling stabil dan matang, baik secara emosional maupun finansial. Pada usia memasuki 40 tahunan dari umur seseorang dalam dunia psikologi terdapat istilah pendek yang berbunyi “*life begins at 40*”. Istilah *life begins at 40* kerap diucapkan sebagai bentuk dukungan atau semangat kepada seseorang yang sudah memasuki usia kepala empat. Disisi lain ungkapan ini juga sebagai gambaran bahwa seseorang di usia 40 tahun sudah memasuki jenjang yang stabil dan matang. Seseorang yang berusia 40 an tahun secara karakter sudah semakin menetap, semakin berakar, puguh dengan siapa diri mereka. Jadi tidak mudah di ombang-ambingkan lagi.

Selain itu tingkat pendidikan dari anggota dewan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas anggota dewan. Tingkat pendidikan seseorang memiliki hubungan yang kompleks dengan kualitas individu. Meskipun tingkat pendidikan sering di anggap sebagai indikator kemampuan dan pengetahuan seseorang, hubungannya dengan kualitas sesorang perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Tabel 4.
Anggota DPRD Kota Balikpapan Partai Golongan Karya Periode 2024-2029
Tingkat Pendidikan

No	Nama	Pendidikan Terakhir
1.	Aguslimin	SMA
2.	Alwi Al Qadri	S1
3.	Andi Arif Agung	S1
4.	Doris Eko Rian Desyanto	MADRASAH ALIYAH NEGERI
5.	Fadilah	S1
6.	Fauzi Adi Firmansyah	SMK
7.	Gasali	SMA
8.	H. Riyan Indra Saputra	S1
9.	H. Yusri, S.E	S1
10.	Hj. Kasmah, S.Sos	S1
11.	Hj. Muliati, S.Pd	S1
12.	Hj. Suwarni, S.H	S1
13.	Nelly Turuallo, S.E	S1
14.	Subari	SLTA
15.	Suriani	SMA
16.	Wahyullah Bandung	S2

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2025,

Tingkat pendidikan anggota dewan terpilih dari partai Golongan Karya cukup baik dimana berdasarkan tabel bisa kita lihat bahwa sebagian besar anggota dari jumlah keseluruhan anggota dewan fraksi partai Golongan Karya berpendidikan tinggi yaitu 9 orang dengan pendidikan terakhir tingkat sarjana dan 1 orang magister dengan 6 lainnya berpendidikan setingkat SMA/ sederajat.

Dari segi Pengalaman rata rata anggota dewan dari partai Golongan Karya merupakan pemenang pileg pada pemilu periode sebelumnya sehingga untuk pengalaman bekerja tidak perlu diragukan. Berikut daftar anggota dewan fraksi partai Golongan Karya berdasarkan jumlah periode menjadi dewan.

Tabel 5.

Anggota DPRD Kota Balikpapan Partai Golongan Karya Periode 2024-2029 Berdasarkan Jumlah Periode Terpilih

No	Nama	Jumlah Periode Terpilih
1.	Aguslimin	1
2.	Alwi Al Qadri	2
3.	Andi Arif Agung	3
4.	Doris Eko Rian Desyanto	3
5.	Fadilah	3
6.	Fauzi Adi Firmansyah	1
7.	Gasali	1
8.	H. Riyan Indra Saputra	1
9.	H. Yusri, S.E	1
10.	Hj. Kasmah, S.Sos	3
11.	Hj. Muliati, S.Pd	1
12.	Hj. Suwarni, S.H	3
13.	Nelly Turuallo, S.E	2
14.	Subari	1
15.	Suriani	2
16.	Wahyullah Bandung	1

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, 2025

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui terdapat 5 anggota DPRD Fraksi Partai Golongan Karya yang sudah terpilih sebanyak 3 periode, 3 anggota DPRD Fraksi Partai Golongan Karya yang terpilih sebanyak 2 periode, dan 8 yang merupakan pendatang baru. Dengan total 8 anggota anggota DPRD Fraksi Partai Golongan Karya yang terpilih lebih dari 1 periode menunjukkan kualitas dari para kader sehingga rakyat kembali menaruh kepercayaan kepada kader partai Golongan Karya. Sejauh perhatian penulis kualitas dari anggota dewan partai Golongan Karya cukup baik sehingga indikator kualitas wakil bisa menjadi alasan terhadap peningkatan kursi anggota DPRD partai Golongan Karya pada pemilihan umum tahun 2024 tetapi belum menjadi alasan mengapa hal tersebut belum bisa menjadi faktor tercapainya target 18 kursi yang telah ditetapkan oleh internal partai Golongan Karya.

b. Komitmen Kerja

Dalam hal Komitmen kerja anggota DPRD Kota Balikpapan Partai Golkar dapat dilihat pada pelaksanaan tugas dan kinerja yang dilakukan. Beberapa kegiatan menggambarkan kinerja seorang anggota dewan. Beberapa kegiatan di luar sidang seperti Reses dan dialog warga merupakan salah satu cara melihat kinerja mereka sebagai wakil rakyat. Karena dengan melakukan hal tersebut kita dapat melihat secara langsung bagaimana para anggota DPRD terpilih terjun langsung kemasyarakat dan dapat menjadi sedikit gambaran seberapa serius dan berkomitmen mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai perwakilan rakyat.

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat juga harus memperhatikan beberapa kelompok masyarakat yang menjadi salahsatu kelompok yang mengakar di Kota Balikpapan, salahsatunya adalah kelompok adat. Djketahui bahwa dari enam belas

anggota DPRD Kota Balikpapan yang berasal dari Partai Golongan Karya seluruhnya sudah melaksanakan kegiatan Reses. Bahkan terdapat tiga anggota DPRD Kota Balikpapan Partai Golongan Karya yang sudah melakukan dua kali kegiatan reses yaitu, Nelly Turuallo, Subari, dan Suriani. kegiatan reses sendiri bertujuan sebagai kegiatan menyerap aspirasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang hasilnya akan dilaporkan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan penyusunan kebijakan. Hal ini merupakan kegiatan interaksi langsung oleh anggota DPRD dengan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.

Selain kegiatan reses anggota DPRD Kota Balikpapan juga melakukan kegiatan dialog warga. Sebagian besar anggota DPRD Kota Balikpapan Fraksi Partai Golongan Karya sudah melakukan dialog dengan warga bahkan ada yang sudah melakukan dialog dengan warga lebih dari satu kali. Komitmen kerja anggota DPRD Partai Golkar sudah baik dan berjalan secara terstruktur. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan reses dan dialog yang bertujuan untuk menyerap aspirasi warga sehingga aspirasi dapat tersampaikan dengan baik serta menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan wakilnya. Namun, perlu adanya pemerataan dari kegiatan reses sehingga dapat menjangkau semua kalangan dan golongan baik itu adat, agama ataupun pemuda.

3.1.2 Dimensi yang Diwakili

Dimensi yang diwakili dalam konsep teori perwakilan politik pitkin yaitu pemilik hak suara yang merujuk kepada masyarakat secara menyeluruh dan sebagai bentuk kepercayaan rakyat secara keseluruhan. Untuk menguji alasan penurunan kursi suatu partai selain dilihat dari calon legislatif yang ada tetapi juga bisa dilihat dari tingkat kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi.

a. Pemahaman Terhadap Konsep Keterwakilan

Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari partai golongan karya dapat dilihat dengan banyaknya pencapaian dan masalah masalah yang telah diselesaikan, seperti penanganan kemiskinan, akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Dapat dilihat pada tahun 2024 Kota Balikpapan mendapatkan peringkat pertama kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia dengan 2,33% selanjutnya kota sawahlunto dengan persentase yang sama disusul dengan kota depok dengan persentase kemiskinan 2,34%.

Selain tingkat kemiskinan yang rendah pelayanan kesehatan di Balikpapan juga sangat diperhatikan dapat dilihat dari program BPJS Gratis bagi pekerja bukan penerima upah (PBPJ) dan bukan pekerja (BP), hal tersebut diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2021. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu. Selain itu pelayanan Pendidikan gratis SD hingga SMA. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang biasa di singkat KLKH Kota Balikpapan merupakan kota terbersih di Indonesia tahun 2024. Beberapa hasil yang diperoleh oleh Kota Balikpapan menjadi bukti bagaimana kinerja dan komitmen dari para wakil rakyat bisa memenuhi apa yang di butuhkan rakyat dan menyelesaikan masalah apa yang ada di Masyarakat dan benar-benar memahami konteks keterwakilan.

b. Kepercayaan terhadap Wakil

Kepercayaan publik terhadap wakil merupakan bentuk dari role evaluation, yaitu penilaian terhadap kesesuaian antara tindakan aktor dengan harapan sosial. Dalam teori peran, evaluasi ini menjadi dasar munculnya sanksi sosial berupa dukungan atau penolakan. Jika anggota DPRD dinilai konsisten dalam menyuarakan kepentingan rakyat,

menjalankan tugas secara transparan, dan merespons kebutuhan masyarakat, maka kepercayaan akan tumbuh. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara peran yang dijanjikan dan yang ditampilkan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik. Oleh karena itu, peran bukan hanya dijalankan, tetapi juga diinterpretasikan dan dinilai oleh masyarakat berdasarkan pengalaman sosial langsung.

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Partai Golkar Cukup Tinggi, Komitmen Kerja yang Baik Menjadi Faktor Utama Kenaikan Kepercayaan, Kombinasi Kinerja dan Karakteristik Personal Menjadi Kunci Kepercayaan Publik. eseluruhan, kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar di Kota Balikpapan terus meningkat seiring dengan kinerja dan pendekatan personal yang dilakukan oleh anggota DPRD mereka. Komitmen terhadap kepentingan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan partai ini dalam memperoleh dan mempertahankan dominasi kursi legislatif di DPRD Kota Balikpapan.

3.1.3 Substansi Perwakilan

Salah satu dimensi dari teori keterwakilan oleh Hanna F. Pitkin adalah dimensi substansi perwakilan. Disampaikan secara tersurat bahwa Masyarakat dipengaruhi oleh beberapa kelompok seperti kelompok agama, kelompok adat dan kelompok pemuda. Dari setiap kelompok tersebut memiliki kepentingan yang berbeda yang akan mempengaruhi pandangan masyarakat.

a. Kepentingan Kelompok Agama

Anggota DPRD secara keseluruhan sudah melaksanakan tugasnya untuk memperjuangkan keperluan dari umat beragama. Dengan adanya keadilan yang diterima oleh seluruh umat beragama yang ada di Kota Balikpapan tanpa terkecuali menjadikan kota Balikpapan salah satu kota yang rukun dan tinggi toleransi antara umat beragamanya hal tersebut dapat dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Harmony Award yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020. Akan tetapi dalam proses penyusunan dan pembentukan kebijakan tokoh agama tidak dilibatkan, namun kebijakan- kebijakan yang didukung oleh anggota dewan khususnya dari fraksi partai Golkar tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam refleksi atas kinerja legislatif, dalam catatan yang tersedia tidak terdapat kebijakan yang melanggar prinsip-prinsip keagamaan, baik dari agama apapun. Tetapi produk kebijakan yang berhubungan dengan keagamaan belum maksimal. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi dewan untuk lebih fokus dan berkomitmen dalam mendengarkan aspirasi masyarakat serta menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan apabila kebijakan sudah diputuskan maka diharapkan penyebarluasan informasi dan sosialisasi di lakukan agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengetahui dan melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Kepentingan Kelompok Adat

Komunikasi antara kelompok adat dan anggota DPRD baik yang berasal dari partai Golongan Karya maupun secara keseluruhan masih belum maksimal. Sehingga banyak hal yang sudah di resmikan tetapi tidak sesuai dengan sejarah adat yang ada, kegiatan adat yang tidak di adakan lagi dewasa ini. Menurut Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan (FKP) Kota Balikpapan Bapak Abdul Rachim. Bahwa komitmen para anggota DPRD terhadap kegiatan yang berhubungan dengan adat dan kebudayaan sangatlah kurang. Selain kurangnya perhatian terhadap kebudayaan yang ada di Kota Balikpapan ada beberapa Keputusan dan kebijakan yang sudah di tetapkan tetapi mengalami penolakan dai kami tokoh adat karena dirasa kurang sesuai dengan Sejarah yang mengikat budaya tersebut.

Hubungan antara tokoh adat dengan anggota DPRD memang tidak diatur secara formal tetapi secara moral dan etika, konsultasi dengan leading sector terkait terhadap kebijakan atau urusan yang berkaitan dengan adat istiadat sangatlah penting. Jika ada kebijakan yang mendukung yang bertentangan dengan nilai-nilai adat, tentu harapannya adalah legislatif dapat mengambil langkah-langkah untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan pihak terkait. Hal ini tidak hanya untuk memastikan bahwa urusan adat dan istiadat dihormati, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan komunitas secara keseluruhan.

c. Kepentingan Kelompok Muda

Guna mengetahui hal yang menjadi penyebab peningkatan perolehan kursi anggota DPRD Kota Balikpapan yang berasal dari parai Golongan Karya yang berasal dari sudut pandang pemuda, penulis telah melakukan wawancara dengan Bendahara Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang menjadi wadah bagi pemuda didalam kehidupan masyarakat sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi Organisasi Pemuda guna meningkatkan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial, menurut Bapak Myrlando Tinto beliau mengatakan kepedulian anggota dewan dari fraksi partai Golongan Karya sangatlah baik terhadap Kepentingan Kelompok muda. Komunikasi yang baik dan program kerja yang positif dan kekinian menjadi salahsatu alasan mengapa partai golongan karya bisa mengalami peningkatan perolehan kursi anggota DPRD di Kota Balikpapan. Partai Golongan karya juga sangat baik dalam proses penjangkaran kader dari partai Golongan Karya, Bapak Myrlando Tinto mengatakan bahwa ada banyak sekali anak muda yang menjadi bagian dari anggota partai Golongan Karya. Anggota DPRD yang berasal dari Partai Golongan karya sudah melakukan komunikasi, pendekatan dan memiliki komitmen yang sangat baik kepada kalangan muda. Sehingga personal dari para kader juga dekat dan melekat di kelompok pemuda. Tetapi memang ada faktor lain seperti perpindahan domisili para pemilih dan adanya sistem Sainte Lague yang diterapkan di Indonesia pada saat ini.

3.1.4 Konteks Politik

Berdasarkan teori keterwakilan oleh Hanna F. Piktin (1967) terdapat dimensi konteks Politik guna memahami bagaimana sistem partai, budaya pemilu, dan sistem pemilu berdampak pada meningkatnya kursi anggota DPRD Partai Golongan Karya.

a. Sistem Partai

Sistem internal partai yang dibangun Partai Golongan Karya di Kota Balikpapan tentu mempengaruhi perolehan kursi anggota DPRD di Kota Balikpapan. Bagaimana struktur organisasi yang jelas dan konseptual dalam anggaran dasar dan aturan rumah tangga sudah dirancang sedemikian rupa. Keberhasilan Partai Golongan Karya dalam meningkatkan perolehan Kursi Anggota DPRD Kota Balikpapan tak lepas dari bagaimana sistem yang dimiliki dari partai tersebut. Tentunya Partai Golongan Karya yang sudah memiliki citra yang cukup baik di masyarakat harus terus mempertahankan apa yang sudah dimiliki pada saat ini sehingga kepercayaan masyarakat akan terus tumbuh.

b. Budaya Politik

Budaya politik mengacu pada pola-pola perilaku, sika, nilai-nilai, dan orientasi politik yang menjadi bagian dari kehidupan politik masyarakat. Budaya politik mencakup cara individu dan kelompok dalam masyarakat memandang dan berpartisipasi dalam roses politik. Budaya politik yang dibangun oleh Partai golongan Karya di kota balikpapan sangatlah baik sehingga masyarakat dapat merasa dekat dengan kader maupun partai Golongan Karya. Selain memiliki motto sekasur, sedapur sesumur partai Golongan

Karya juga memiliki filosofi seperti pohon sesuai dengan lambang yang dimiliki oleh partai Golongan Karya. Dengan beberapa budaya politik yang dimiliki Partai Golongan Karya tentu dapat menjadi alasan mengapa Partai Golongan Karya dapat mengalami Peningkatan dalam perolehan kursi anggota DPRD di Kota Balikpapan pada pemilihan umum 2024. Tentunya partai Golongan Karya harus bisa mempertahankan budaya yang sudah sangat baik ini dan terus mengadakan evaluasi dan memperbaiki beberapa hal yang masih belum baik.

c. Sistem Pemilu

Dalam sistem penentuan kursi legislatif Indonesia menganut sistem *sainte lague*. Metode ini diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Perancis bernama Andre Sainte Lague pada tahun 1910. Metode *sanite lague* adalah metode konversi perolehan suara partai politik ke kursi parlemen atau metode untuk menentukan perolehan kursi partai politik di DPR atau DPRD. Penerapan metode didasarkan pada perolehan suara terbanyak partai politik dari hasil pembagian yang diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap dapil. *Sainte Lague* menggunakan bilangan pembagi suara berangka ganjil (1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya) untuk mendapatkan kursi. Dasar hukum penerapan metode ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 415 Ayat 2.

Sebagai individu yang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu, penulis melihat pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pemilihan. Diskusi tentang sistem pembagian kursi pemilih haruslah lebih dari sekadar pertimbangan tentang kepentingan partai politik tertentu. Sistem pemilihan yang adil dan representatif adalah landasan demokrasi yang kokoh, yang memastikan setiap suara dihargai dan setiap pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi arah politik negara. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa reformasi dalam sistem pemilihan harus bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, tanpa memihak kepada satu kelompok atau partai politik tertentu. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kepentingan seluruh rakyat.

3.2 Faktor yang Menjadi Peluang dan Penghambat Keterpilihan Anggota DPRD dari Partai Golongan Karya dalam Mencapai Target Perolehan Kursi yang ditetapkan pada Pemilihan Umum 2024 Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

3.2.1 Faktor Peluang

Partai Golongan Karya memiliki jaringan basis massa yang besar dan kuat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain, karena partai Golongan Karya merupakan salah satu partai besar yang sudah cukup lama hadir di Indonesia sehingga banyak anggota partai terdahulu dan terus berkembang yang jumlahnya cukup banyak. Hal ini dibuktikan dengan Partai Golkar memperoleh 16 kursi dari total 45 kursi DPRD Kota Balikpapan, menjadikannya partai dengan perolehan kursi terbanyak. Jumlah suara yang diraih pun paling tinggi, yaitu 122.584 suara, jauh mengungguli partai lain seperti NasDem 42.259 suara dan PDIP 43.778 suara. Kemenangan ini terjadi secara merata di hampir semua daerah pemilihan (dapil), menunjukkan distribusi suara yang kuat di berbagai wilayah. Data tren historis menunjukkan bahwa jumlah kursi DPRD yang diperoleh Golkar meningkat dari 12 kursi pada tahun 2014, 11 kursi pada tahun 2019, dan menjadi 16 kursi pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa basis dukungan Golkar tidak hanya kuat, tapi juga bertumbuh secara konsisten, menandakan adanya kerja partai yang efektif di akar rumput.

Proses perekrutan anggota partai yang mencakup semua kalangan yang membuat sayap partai Golongan Karya semakin membentang dan mencapai ke semua kalangan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan filosofi sekasur, sedapur, sesumur dalam membangun jejaring sosial-politik. Sekasur, mengajak pasangan atau keluarga inti untuk mendukung partai. Sedapur, menyebarluaskan nilai-nilai Golkar ke keluarga besar, Sesumur memperluas pengaruh ke tetangga dan lingkungan. Strategi ini memperlihatkan bahwa proses perekrutan dilakukan secara informal, interpersonal, dan melekat dalam kehidupan sosial masyarakat dari berbagai kalangan. Juga dapat dilihat dari anggota DPRD terpilih yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, usia, dan latar belakang.

Memiliki rekam jejak yang sangat baik di Kota Balikpapan. Terbukti dari dominasi Anggota DPRD terpilih beberapa periode kebelakang yang dimiliki oleh partai Golongan Karya. Selain itu terpilihnya kembali Walikota Balikpapan yang merupakan usungan dari partai Golongan Karya untuk periode ke-2. Terpilihnya Gubernur Kalimantan Timur yang berasal dari partai Golongan Karya. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan keduanya berasal dari partai Golongan Karya. Serta perolehan kursi DPRD di Kota Balikpapan yang terus mendominasi disetiap periodenya.

3.2.2 Faktor Penghambat

Perubahan dinamika politik yang tidak terduga dan sulit diprediksi. Sehingga memungkinkan terjadinya pergejolakan dan perubahan citra partai Golongan Karya pada pandangan masyarakat. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih selektif dalam memilih wakil rakyat, dan menilai tidak hanya partai tetapi juga personalitas dan rekam jejak masing-masing calon. Bila calon dari Golkar tidak memenuhi ekspektasi tersebut, maka dukungan dapat beralih, sekalipun Golkar secara historis kuat.

Pergerakan perpindahan domisili penduduk yang terjadi cukup tiba-tiba. Sehingga menyebabkan kurang tepatnya partai Golongan Karya dalam menempatkan calonnya. Hal ini berdasarkan perbandingan jumlah penduduk antar kecamatan pada tahun 2018 dan 2024. Pergerakan domisili penduduk tentu akan mempengaruhi jumlah suara yang dimiliki oleh partai dan strategi penempatan para calon anggota DPRD.

Kurang memerhatikan beberapa tindakan yang berhubungan pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Salahsatunya pada kelompok adat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan. Kurangnya komunikasi tersebut tentu akan mengurangi penilaian pada kelompok masyarakat tersebut sehingga para anggota DPRD harus lebih memerhatikan seluruh kelompok masyarakat secara merata.

Sistem pemilu yang menggunakan metode sainte lague yang membuat partai saling berebut kursi untuk anggota partainya. Hal ini dikarenakan Metode Sainte-Laguë dalam pemilu legislatif menciptakan kompetisi ketat antarkandidat dari partai yang sama, termasuk Golkar. Hal ini memunculkan konflik kepentingan internal dan berpotensi merusak citra partai secara kolektif di mata publik, karena masyarakat lebih banyak melihat persaingan individu daripada kerja tim partai. Hal ini berkenaan dengan hasil wawancara dengan Bendahara Umum DPD Partai Golkar Kota Balikpapan, Bapak Ahmad Mallolongan beliau mengatakan bahwa “Sistem Sainte Lague memang kurang menguntungkan bagi Partai Golkar... ada beberapa dapil yang hampir saja mendapatkan tambahan satu kursi tetapi kalah dalam proses perebutan kursi dengan selisih suara di bawah 50”.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini yaitu Peran keterwakilan anggota DPRD Partai Golongan Karya mencerminkan dimensi wakil, yang diwakili, substansi perwakilan, dan budaya politik yang cukup kuat, namun masih perlu penguatan pada aspek inklusi. Anggota DPRD Golkar menunjukkan keterlibatan aktif sebagai wakil melalui kegiatan reses, komunikasi politik, serta penyampaian aspirasi masyarakat dalam forum legislatif. Mereka juga berhasil membangun hubungan dengan masyarakat sebagai yang diwakili, khususnya di kalangan konstituen loyal. Namun, pada dimensi substansi perwakilan, keterlibatan terhadap kelompok adat, yang menunjukkan perlunya perluasan partisipasi. Secara teori peran, performa yang ditampilkan oleh wakil sudah sesuai harapan sebagian besar masyarakat, namun belum menyeluruh pada semua segmen sosial.

Dalam proses pemilihan terdapat beberapa faktor yang penghambat pencapaian perolehan kursi anggota DPRD Kota Balikpapan yang berasal dari partai Golongan Karya meningkat yaitu 16 kursi tetapi masih belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh internal partai Golongan Karya yaitu 18 kursi. Perubahan dinamika politik yang tidak terduga dan sulit diprediksi. Sehingga memungkinkan terjadinya pergeseran dan perubahan citra partai Golongan Karya pada pandangan masyarakat. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut: Pergerakan perpindahan domisili penduduk yang terjadi cukup tiba-tiba. Sehingga menyebabkan kurang tepatnya partai Golongan Karya dalam menempatkan calonnya. Kurang memerhatikan beberapa tindakan yang berhubungan pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Sehingga mengurangi penilaian pada kelompok masyarakat tersebut. Sistem pemilu yang menggunakan metode *sainte lague* yang membuat partai saling berebut kursi untuk anggota partainya.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Saifullah (2024), yaitu sistem *sainte lague* berpengaruh terhadap penurunan kursi partai pada parlemen. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Nur et al. (2022), Muslimin (2024), Niron & Seda (2020), Lestari & Taubih (2024), Agastya et al. (2024), dan Wibisono et al. (2023) karena perbedaan fokus penelitian, yaitu membahas keterwakilan perempuan, faktor kepercayaan publik, dan implementasi *marketing* politik.

IV. KESIMPULAN

Peran anggota DPRD Partai Golongan Karya mencerminkan dimensi wakil, yang diwakili, substansi perwakilan, dan budaya politik yang cukup kuat melalui kegiatan reses, komunikasi politik, dan penyampaian aspirasi masyarakat dalam forum legislatif, meskipun aspek inklusi masih perlu diperkuat. Mereka berhasil membangun hubungan dengan konstituen loyal, namun partisipasi kelompok adat belum optimal, sehingga diperlukan upaya untuk memperluas keterlibatan sosial demi mencapai representasi yang lebih menyeluruh. Pada pemilihan anggota DPRD Kota Balikpapan, Partai Golongan Karya berhasil meraih 16 kursi, namun masih belum mencapai target internal partai yaitu 18 kursi. Faktor penghambat pencapaian tersebut antara lain perubahan dinamika politik yang tidak terduga, perpindahan domisili penduduk yang menyebabkan penempatan calon kurang tepat, kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat tertentu, serta sistem pemilu metode *Sainte-Laguë* yang meningkatkan persaingan perebutan kursi antarpartai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini berfokus pada keterwakilan anggota DPRD Partai Golongan Karya. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi waktu dan biaya penelitian. Selain itu, penelitian ini terbatas di Kota Balikpapan dan merujuk pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini merupakan langkah awal yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian serupa di masa mendatang. Penelitian lanjutan terkait eksistensi anggota DPRD Partai Golongan Karya pada kontestasi politik diperlukan guna analisis yang lebih mendalam dan validasi atas penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan penelitian ini. Dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak memungkinkan penelitian ini terlaksana dengan baik dan menghasilkan temuan yang berguna bagi Partai Golongan Karya dalam memahami faktor apa saja yang dapat meningkatkan representasi kursi anggota DPRD di Kota Balikpapan. Kemudian, Partai Golongan Karya dapat menyiapkan strategi untuk dapat mempertahankan dan bersaing dengan partai politik lainnya dalam perolehan jumlah suara.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, I. (2022). Analisis Bibliometrik Vos Viewer tentang Centre of Excellence Lembaga Diklat. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.47668/PKWU.V10I1.331>
- Agastya, R., Taufik, M., & Dama, M. (2024). Pemetaan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik di Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 11–22. <https://doi.org/10.30872/JIP.V12I1.1616>
- Bhera, P. F. L., Rodriquez, S., & Dhosa, D. (2025). Jaringan Politik DPD II Partai Golongan karya Ngada pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kabupaten Ngada. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 349–356. <https://doi.org/10.71128/E-GOV.V3I1.216>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publication Inc.
- Janusz, A., Barreiro, S. N., & Cintron, E. (2022). Political parties and campaign resource allocation: Gender gaps in Brazilian elections. *Party Politics*, 28(5), 854–864. https://doi.org/10.1177/13540688211018424/SUPPL_FILE/SJ-PDF-1-PPQ-10.1177_13540688211018424.PDF
- Lambelanova, R., Jaelani, R., & Verina, V. K. D. P. (2022). *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Lambelanova, R., Saputra, R., & Nurfurkon, A. (2024). How is Political Behavior in Decision-Making? Organizational Culture Perspective in Governance. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(1). <https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i1.4335>
- Larsson, O. A. (2023). The rise of Instagram as a tool for political communication: A longitudinal study of European political parties and their followers. *New Media and Society*, 25(10), 2744–2762. <https://doi.org/10.1177/14614448211034158>
- Lestari, S., & Taubih, L. A. (2024). Stratelgi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa Dalam Meningkatkan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Sumbawa 2024. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(3), 194–203–194–203. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/2221>

- Meijers, M. J., & Zaslove, A. (2021). Measuring Populism in Political Parties: Appraisal of a New Approach. *Comparative Political Studies*, 54(2), 372–407. https://doi.org/10.1177/0010414020938081/SUPPL_FILE/README.TXT
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Muslimin, F. N. (2024). *Strategi Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan DPRD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Studi Kasus Partai PDI Perjuangan)* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18908>
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *ARISTO*, 9(2), 203–228. <https://doi.org/10.24269/ARS.V9I2.2158>
- Nur, H., Sumandiyar, A., & Yanto, M. R. (2022). Peningkatan Perolehan Kursi Partai Nasdem pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Maros. *Sawerigading Journal of Sociology*, 1(1), 28–39. <https://ojs.unsamakassar.ac.id/sjs/article/view/95>
- Peris, M. P., & Setianingrum, V. M. (2025). Strategi Humas DPD Partai Golongan Karya Jawa Timur dalam Meningkatkan Citra Organisasi pada Pemilu 2024. *The Commercium*, 9(2), 83–103. <https://doi.org/10.26740/TC.V9I2.66539>
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Saifullah. (2024). *Penurunan Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Aceh Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19922>
- Slothuus, R., & Bisgaard, M. (2021). How Political Parties Shape Public Opinion in the Real World. *American Journal of Political Science*, 65(4), 896–911. <https://doi.org/10.1111/AJPS.12550>
- Tarigan, M. H., & Ginting, A. H. (2020). Model Organisasi Sekretariat Dewan dalam Mendukung Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi Lampung. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 51–66. <https://doi.org/10.33701/J-3P.V5I1.1003>
- Wibisono, D. D., Puspa, R., & Widodo, S. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Mempertahankan Suara Partai Sebagai Partai Tengah. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(1), 832–842. <https://doi.org/10.56832/EDU.V3I1.284>